



ANALISIS MANFAAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI NTT

Maria Kurniawati Jani¹, Norman Duma Sitinjak², Risnaningsih³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang

³Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

^{1,2}noma1274@gmail.com

³ningsihrisna@yahoo.com

Article history:

Received: 2021-01-27

Revised: 2021-02-05

Accepted: 2021-02-25

✉ Corresponding Author:

Name author: Maria Kurniawati Jani

E-mail:

Abstract

This study examines the role of financial management for the welfare of society. The research was conducted by means of Participatory Action Research in order to be more detailed, tangible in data collection and better understand the existing situation. The data source is secondary. The year of observation is 2014 to 2017. The results of the study are that good regional financial management will improve the welfare of the community. The research location is Manggarai Regency.

Keywords: Regional financial management, community welfare

Abstrak

Penelitian ini menguji peranan pengelolaan keuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara *Participatory Action Research* agar dapat lebih rinci, nyata dalam pengumpulan data dan lebih memahami keadaan yang ada. Sumber data adalah sekunder. Tahun pengamatan adalah 2014 sampai dengan 2017. Hasil penelitian adalah pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Manggarai.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat

1. Latar belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperoleh dengan kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Kepmen No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Indikator kesejahteraan masyarakat yang baik adalah adanya peningkatan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Penciptaan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara merupakan amanat perjuangan kemerdekaan.

Konstitusi tegas mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. Tertuang dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan atau persaudaraan, yang menjunjung kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama, bukan persaingan individualism.

Kabupaten Manggarai yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang turut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik. Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan salah satu aturan yang dipakai oleh Pemkab manggarai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Teori

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi ekuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Saleh dan Rohcmansjah (2010) menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), Transparansi, Pengendalian

Manajemen Keuangan Daerah

Halim (2001) menjelaskan bahwa manajemen keuangan daerah merupakan penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakan dengan cara *Participatory Action Research* agar dapat lebih rinci, nyata dalam pengumpulan data dan lebih memahami keadaan yang ada. (MacDonald, 2012). Penjelasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang bermanfaat menjelaskan suatu keadaan (Moleong, 2007). Peneliti ikut berpartisipasi dalam membantu pengerjaan administrasi keuangan daerah. Sumber data adalah sekunder.

4. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Tabel 1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2017.

Periode	Kab. Manggarai (%)	Prov. NTT (%)
2014	5,11	5,05
2015	5,00	4,92
2016*	5,09	5,17
2017**	5,12	5,16

• Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Manggarai BPS

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, PEMDA Kabupaten Manggarai telah mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai memiliki trend yang positif karena dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Trend positif perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah setempat, baik dari sisi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran transparansi dan pengendalian yang semakin baik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Hamid (2018), Kehik dan Mael (2017) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mampu meningkatkan perekonomian/kesejahteraan masyarakat setempat.

Peningkatan perekonomian daerah yang mengalami pertumbuhan dan dalam trend positif sekaligus menunjukkan kualitas hidup masyarakat setempat yang semakin membaik. Peningkatan kualitas masyarakat yang semakin baik akan kembali memberikan dampak positif bagi keuangan daerah, karena PAD PEMDA akan mengalami peningkatan.

5. Kesimpulan

Sistem dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Pengelolaan keuangan di Kota Ruteng memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ruteng.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka-Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas*. **1(4)**.
- Kehik, B. S. dan Mael. M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*. **2(3)**.

- MacDonald, C. (2012). Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option. *The Canadian Journal Of Action Research*. **13**(2)
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Sholeh, C. dan Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.